



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **VERA MARIETHA MEINAR REJEKI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN**
3. NHK : **233947**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/53 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.815.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI LX230B Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOBIL, RENAULT KOLEOS GM38 NO5C C2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. MOTOR, BENELLI BS 500 BL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



6. MOTOR, KAWASAKI KAWASAKI W175 TR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. MOTOR, HONDA HONDA CB500X Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
8. MOTOR, ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. MOBIL, BYD ME-8 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	469.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.168.882.178
F. HARTA LAINNYA	Rp.	83.966.561
Sub Total	Rp.	9.937.348.739
III. HUTANG	Rp.	900.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.037.348.739

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.